

E. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**1. PERENCANAAN**

Urusan Perencanaan dilakukan oleh perangkat daerah Bappeda dan 15 kecamatan se Kabupaten Wonosobo.

a. Alokasi Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 10.785.024.205,- atau 0,54% dari total alokasi APBD tahun 2017 yang berjumlah Rp. 2.000.613.704.761,-. Alokasi sebesar Rp. 10.785.024.205,- dapat terealisasi sebesar Rp. 9.673.874.628,- atau 89,70%. Adapun program dan alokasi anggaran urusan Perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.E.1.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Perencanaan Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A	BelanjaLangsung	7.092.454.500	6.409.253.525
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	14.700.000
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	175.000.000	172.343.300
3	Program Pengembangan Data/Informasi	100.000.000	69.223.000
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.949.822.000	1.784.688.544
5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.415.000.000	1.130.794.105
6	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1.912.000.000	1.744.617.389
7	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	290.000.000	278.039.858
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	665.458.300	653.132.703
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	570.174.200	561.714.626
B	BelanjaTidak langsung	3.692.569.705	3.264.621.103
1.	Belanja Pegawai	3.692.569.705	3.264.621.103
	Jumlah total	10.785.024.205	9.673.874.628

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2017 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur bertujuan dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis aparat Bappeda Kabupaten Wonosobo melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan bertujuan meningkatkan penyediaan laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi perencanaan pembangunan yang akurat untuk menunjang pembangunan dan meyelaraskan kegiatan pembangunan di segala bidang. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi untuk pengendalian pembangunan. Implementasi kegiatannya berupa penyusunan pelaporan terintegrasi meliputi LKPJ, LPPD dan EKPPD.

3) Program Pengembangan Data/Informasi

Program pengembangan data/informasi dimaksudkan untuk memvisualisasikan kondisi Kabupaten Wonosobo dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), berisi tentang gambaran umum kondisi Kabupaten Wonosobo yang dapat digunakan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah pada kurun waktu tertentu.

4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program perencanaan pembangunan daerah merupakan gambaran tugas dan fungsi teknis atau utama Bappeda yaitu merupakan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah, dengan tujuan terlaksananya musrenbang dan penyusunan RKPD 2018, penyusunan KUA dan PPAS perubahan 2017 dan penetapan 2018 serta terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk :

- Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah maupun sektor.
- Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya .
- Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya dalam prioritas pembangunan.
- Memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program perencanaan pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan pertanian, industri, koperasi UMKM serta pariwisata yang antara lain berupa kegiatan fasilitasi untuk pengembangan fedep, klaster dan agropolitan serta penyusunan kajian tentang produk unggulan daerah maupun pengembangan kawasan ekonomi terpadu. Di mana tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut antara lain memberikan informasi dan arahan bagi pelaksana pembangunan di bidang ekonomi dan pelaku ekonomi tentang potensi klaster, kajian pasar tani agropolitan, roadmap produk unggulan daerah dan kajian arah pengembangan kawasan ekonomi terpadu, sehingga dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan-kebijakan ekonomi di Kabupaten Wonosobo.

6) Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program perencanaan sosial dan budaya dimaksudkan untuk tercapainya perencanaan pembangunan sosial dan budaya yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pemerintahan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain perencanaan pendidikan untuk semua, fasilitasi SDG's, PKH, KHPPIA, GAKY serta validasi data BDT. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi dan upaya mewujudkan sinergitas program penanggulangan kemiskinan, yang didukung dengan adanya penyempurnaan pengembangan data kemiskinan di Kabupaten Wonosobo sebagai satu database kemiskinan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder dalam rangka intervensi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.

7) Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam dimaksudkan agar tercipta perencanaan yang terintegrasi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, yang diimplementasikan melalui kegiatan fasilitasi program pusat untuk perencanaan infrastruktur, pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sanitasi. Untuk mendukung kegiatan tersebut agar tepat sasaran diperlukan data spasial yang bisa diakses secara cepat melalui kegiatan pengembangan webgis, yaitu pemetaan digital yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media komunikasi yang berfungsi mendistribusikan, mempublikasikan dan menyediakan informasi dalam bentuk teks, peta digital serta menjalankan fungsi-fungsi analisis.

8) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kualitas administrasi perkantoran yang tertib dan lancar serta terlaksananya tugas kedinasan dengan cepat dan akurat yaitu melalui : Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air

III.E.1.Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan

dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.

9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan melalui Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor maupun Sarana Prasarana Kantor, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor maupun Perlengkapan Kantor serta Fasilitas Tenaga Kebersihan.

c. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

Tabel III.E.1.2
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Berdasarkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Pembangunan		
		2015	2016	2017
1	Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada
4.	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2017

Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari indikator tersedianya dokumen perencanaan baik itu RPJPD, RPJMD maupun RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda maupun Perkada serta adanya penjabaran RPJMD ke dalam RKPD. Di mana semua indikator tersebut telah dipenuhi oleh Kabupaten Wonosobo.

Tabel III.E.1.2
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2017
Berdasarkan Indikator RKPD 2017

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	100%	90%	96%	106,67	○
2	Persentase kesesuaian Program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD	100%	100%	84,7%	84,7	↓
3	Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD dengan program dalam RKPD	DTD	90%	100%	111,11	○
4	Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,9632 (tinggi)	> 3 (sangat tinggi)	2,93	97,67	→
5	Persentase OPD menyusun dokumen perencanaan (Renja OPD) tepat waktu	100%	90%	100%	111,11	○
6	Persentase serapan kegiatan dan anggaran	89%	100%	85.74%	85,74	↓
7	Persentase aparat perencana yang memiliki sertifikat diklat perencanaan	100%	35%	100%	285,71	○
8	Persentase keterisian format data dan informasi dalam sistem informasi pembangunan daerah	100%	100%	70.00%	70.00	↓
9	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	77%	100%	90.00%	90.00	→
10	Persentase dokumen perencanaan sosial budaya yang terimplementasi dalam kegiatan OPD	70%	100%	80.00%	80.00	↓
11	Persentase kenaikan produksi produk unggulan dalam OVOP dan ODOP	2.88	5%	3.00%	60.00	↓
12	Persentase Kenaikan jumlah/jenis produk unggulan dalam OVOP dan ODOP	133.33	5%	14.29%	285.80	○
13	Jumlah pengembangan kawasan pedesaan berbasis OVOP	27	1	50	5000.00	○
14	Persentase kenaikan Jumlah desa yg menjadi pusat pertumbuhan	0	6%	1%	16,67	↓
15	Tingkat aksesibilitas (panjang Jalan/ Luas wilayah)	0.792	79.47	1.01%	0.01	↓
16	Persentase kegiatan PD yang sesuai dengan perencanaan wilayah dan sumber daya alam	0.5	75%	8,54%	11,39	↓

III.E.1.Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
17	Persentase KSCT (kawasan strategis cepat tumbuh) yang dilegalisasi	0%	30%	0%	0	↓
18	Persentase Panjang jalan kawasan perbatasan dalam kondisi baik dan sedang	45%	48%	48.24%	100,5	○
19	Persentase kecamatan yang sudah memiliki pemetaan detail rawan bencana	100%	42%	40%	95,24	→
20	Persentase Desa Rawan bencana yang terpasang EWS (early warning system)	20%	8%	10%	125	○
21	Persentase dokumen rencana kontinjensi yang tersusun terhadap total jenis bencana	75%	35%	35%	100	○
22	Rapor ketangguhan bencana	sedang	baik	Sedang		→
23	Persentase dokumen jenis bencana yang sudah tersusun dalam rencana kontinjensi	100%	42%	50%	199,99	○

Sumber : Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2017

Keterangan Status Capaian :

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ○ | Tercapai | Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$ |
| → | Tidak tercapai | Realisasi capaian 90%- 99% |
| ↓ | Tidak tercapai dan perlu upaya keras | Realisasi capaian $\leq 90\%$ |

Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan bisa dilihat dari indikator RKPD 2017. Di mana dari 23 indikator, 10 indikator sudah tercapai, 4 indikator tidak tercapai, 9 indikator tidak tercapai dan perlu upaya keras. Indikator yang tidak tercapai dan perlu upaya keras ada di semua program urusan perencanaan. Untuk meningkatkan capaian tersebut perlu diintensifkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 1) koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi sehingga akan tepat sasaran, 2) meningkatkan sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian, 3) memperkuat keterkaitan proses perencanaan, proses penganggaran dan proses politik dalam menterjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.

d. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan Perencanaan, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu:

Tabel III.E.1.4
Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Perencanaan

No	Masalah	Solusi
1.	Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan sehingga masih ada program maupun indikator program yang belum sesuai dengan perencanaan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021.	▪ Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan. ▪ Melakukan asistensi dan penajaman dokumen perencanaan pembangunan untuk menjaga kesesuaian antara dokumen perencanaan.
2.	Data atau informasi dalam mendukung penyusunan perencanaan teknokratik masih lemah/tidak ada data/kurang valid/sering berubah-ubah sehingga dalam membuat proyeksi arah pembangunan mengalami kesulitan karena data tidak lengkap.	▪ Pengintegrasian pengelolaan data secara terpusat baik tingkat kabupaten maupun tingkat OPD. ▪ Melakukan validasi data dan menentukan data base.
3.	Prioritas usulan perencanaan pembangunan masih didominasi pembangunan fisik sementara pembangunan sumber daya manusia/pemberdayaan masyarakat belum tergal.	▪ Memberikan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat tentang skala prioritas yang tidak harus mengutamakan pembangunan fisik tapi harus seimbang dengan pembangunan pemberdayaan masyarakat.
4.	Dalam perencanaan pembangunan usulan kegiatan CSR belum terakomodasi sehingga CSR dalam melakukan kegiatan sering tidak terdokumentasi.	▪ Mensinergikan program kegiatan pembangunan daerah dengan kegiatan CSR.
5.	Kurang tepatnya sasaran kegiatan pembangunan sehingga kegiatan tidak berkelanjutan.	▪ Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif untuk mengetahui layak tidaknya kegiatan yang akan dilaksanakan.